

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI SKPD

PAGU SUB.KEGIATAN: Rp. 5.146.907.300-

#### **URAIAN KEGIATAN:**

#### I. LATAR BELAKANG:

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah . Guna menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi kesekretariatan secara efektif dan efisien terutama Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu , dalam rangka Meningkatkan Kualitas Layanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

#### II. DASAR HUKUM:

- 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
- 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan iangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
- 8. Intruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029
- 9. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 04):
- 13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
- 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor ...... Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor .......).
- 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 8);
- 16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah ( Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

#### III. MAKSUD DAN TUJUAN:

Untuk mendukung kelancaran, kenyamanan serta pemenuhan dan kewajiban serta meningkatkan kinerja dan layanan kesekretariatan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### IV. OUTPUT/KELUARAN:

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### V. OUTCOME:

Tersedianya Layanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD

#### VI. SASARAN:

2 (dua) Laporan

#### VII. LOKASI:

Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

## VIII. TAHAPAN

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
- Pengajuan Surat Tugas Pelaksana Kegiatan,
- Proses TNT
- Proses Pelaporan/SPJ

#### IX. WAKTU PELAKSANAAN:

NO	URAIAN	BULAN											
NO	URAIAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan												
2	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor												
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak												
4	Belanja Perjalanan Dinas												

## X. PIHAK YANG TERLIBAT:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

## XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 5.146.907.300,- terbilang (Lima milyar Seratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus delapan tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN					
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 22.680.000,-					
2	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp. 16.491.900,-					
3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 5.101.913.000,-					
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 5.822.400					
	JUMLAH	Rp. 5.146.907.300					

# XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN:

- Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBDPerjalanan Dinas Dalam Negeri dan/atau Keputusan Bupati tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas ),

Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD, DJP Online,

# XIII. HAL-HAL LAIN:

Yang harus ada adalah : Jadwal Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya.

September 2025

PRD,

Satulicin,

Mechyadi Noor, S.Sos., MA

embina Utama Muda (IV/c) IIP 19660118 198602 1 003